

## Raperda CSR Dorong Industri Anggarkan Biaya Pendidikan

Anggota Pansus Raperda Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Taman menuturkan, CSR perusahaan bisa turut mengembangkan dunia pendidikan bahkan menciptakan calon tenaga kerja profesional, dan sesuai dengan kebutuhan berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang. "Dengan formulasi yang tepat dalam penyaluran CSR ke lingkungan pendidikan, bisa mengembangkan kualitas siswa," katanya, usai membahas raperda tersebut, Rabu (8/7).

Dikatakan Taman, di tingkat SMK bisa juga menciptakan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Karawang. Dengan demikian, menurutnya hal tersebut bisa menjadi salah satu cara mengatasi pengangguran di Kota Pangkal Perjuangan. "Raperda CSR yang sedang kami bahas membuka ruang bagi perusahaan bisa memberikan CSR-nya untuk lingkungan

pendidikan dan turut mengembangkan kualitas siswa. Tinggal kita cari formulasinya, agar dari CSR ini juga bisa menciptakan calon tenaga kerja profesional yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan," ujarnya.

Taman juga mengatakan, sebelumnya Komisi IV sempat melakukan kunjungan ke Kabupaten Bekasi mempersiapkan tenaga kerja dan program pengentasan pengangguran. Di Bekasi terdapat SMK khusus yang dibangun beberapa perusahaan otomotif melalui dana CSR. "Sekolah yang dibangun perusahaan ini bisa menciptakan tenaga kerja yang siap kerja sesuai keilmuan di sekolah. Karena mereka bisa mempelajari spesifikasi yang dibutuhkan perusahaan selama tiga tahun sekolah," katanya.

Menurutnya, di Karawang dengan ribuan perusahaan yang ada sangat memungkinkan untuk menciptakan hal serupa. Atau bahkan mencari formulasi

berbeda yang cocok dengan kearifan lokal Karawang. "Misal melalui CSR perusahaan otomotif dan elektronik bekerjasama dengan SMK yang ada di Karawang, dengan memberikan alat serta tenaga pengajar. Sehingga siswa SMK di Karawang bisa mempelajari spesifikasi kebutuhan perusahaan selama masih di sekolah, dan ketika lulus sudah benar-benar siap untuk bekerja," paparnya.

Masih dikatakan Taman, masalah teknis pelaksanaan pemanfaatan CSR tentunya akan menjadi pekerjaan rumah untuk Pemerintah Kabupaten Karawang. Agar apa yang tertuang dalam Perda CSR bisa terealisasi dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. "Kami di DPRD membuat regulasi secara umum dalam Perda CSR. Tinggal bagaimana nanti pemkab membuat juklak dan juknisnya dalam Perbup agar tujuan dari perda ini dapat terealisasi," pungkasnya. (nce)